

Menuju Ground Breaking 2014

Terkait dengan harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar pemacangan tiang perdana (*ground breaking*) megaprojek Jembatan Selat Sunda (JSS) bisa dilaksanakan 2014, akhir pekan lalu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan dirinya sudah memilih dan mengusulkan nama-nama sejumlah BUMN untuk berkonsorsium dalam menggarap pembangunan JSS kepada Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

Dimas Novita S. & Zufrizal
redaksi@bisnis.co.id

Namun, Djoko enggan menyebut BUMN mana saja yang telah dilisulkannya tersebut. "Saya pun sudah milik [BUMN], tapi siapa yang saysilah itu biar Menko [Perekonomian] yang bicara."

Seperi diketahui pembangunan JSS yang direncanakan selesai pada 2025 itu membutuhkan biaya hingga Rp250 triliun, termasuk antara lain pembangunan jalan tol, jalur rel kereta api, jaringan pipa gas, listrik, dan telekomunikasi.

"Tidak hanya jembatan untuk transportasi kendaraan tapi bisa juga untuk pipa hawat, laut dan sebagainya, sehingga mereka bisa berinvestasi di sana," ujarnya.

Sejumlah BUMN yang dihubungi *Bisnis*, memberikan jawaban beragam mengenai kesiapan mereka dalam berpartisipasi di proyek tersebut.



"Kalu bicara kemungkinan pasti selalu ada peluang di sana, akan tetapi tentunya butuh waktu, tingkat finansial yang lebih tinggi, serta aspek legalnya," ujar Sekretaris Korporasi PT Wijaya Karya Tbk Natal Argawan.



"Untuk pipa bawah laut Jawa ke Sumatra itu kami sudah punya, jadi kemungkinan tidak ikut," ujar Corporate Communication PT Perusahaan Gas Negara Tbk Ridha Ababi.



"Sampai saat ini tidak ada rencana, akan tetapi bisa saja berubah di masa depan, tergantung kapan jembatan tersebut dibangun," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji.

"Tidak menutup kemungkinan kami ikut serta. Tentu-

nya KAI tidak sendiri, semua BUMN memiliki kesepatan yang sama. Dengan begitu rencana jalur kereta Jawa-Sumatra dapat terealisasi," ujar Humas PT Kereta Api Indonesia Mateta Rizalulhaq.

Profil Jembatan

Panjang: 29 kilometer

Lebar: 60 meter

Jalan mobil: 2x3 meter

Jalan sepeda motor dan pejalan kaki: 2x1 meter, jalur ganda kereta di tengah

Lokasi: 50 kilometer dari Gunung Anak Krakatau, desain tahan gempa dan tsunami

Melintasi tiga pulau: Prajurit, Sangiang, dan Ular.

Terdiri atas dua jembatan gantung berbentang ultrapanjang: 3,5 km dan 7 km. Terdiri atas tiga jembatan konvensional berbentang: 6 km-7,5 km.

Kapasitas maksimum: 160.000 kendaraan dan 31.318 orang per hari, barang seperti batu bara sekitar 1,75 juta ton per tahun atau 4.700 ton per hari.

Kronologi Rencana Pembangunan JSS

1960: Prof Sedayatno dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mencetuskan ide pembangunan JSS untuk menghubungkan Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

1965: Desain percobaan mulai disusun di ITB.

1986: Presiden Soeharto menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) B.J. Habibie untuk menangani proyek ini yang masuk dalam megaprojek Tri Nusa Bima Sakti (proyek yang menghubungkan tiga pulau yakni Sumatra, Jawa, dan Bali), serta studi mengenai kondisi alam dan pengembangan teknis.

1986: Departemen Pekerjaan Umum (kini Kementerian PUPR) melakukan studi sosio ekonomi terkait estimasi perlindungan lalu lintas.

1997: Prof Dr Wiratman Wangsadipta, pemilik Wiratman & Associates akademisi ITB, melakukan studi awal dan memberikan rekomendasi bahwa jembatan panjang merupakan alternatif terbaik dibanding terowongan.

Studi tersebut mengestimasi proyek ini akan menelan dana sekitar Rp25 triliun dengan masa konstruksi 10 tahun.

2002: Rencana pembangunan JSS dilanjutkan oleh Departemen Perkiminan dan Prasarana Wilayah (Dekpimprawil) dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Perhubungan China. Kedua negara bersepakat melakukan studi teknologi spesifik dan investigasi geologi.

2007: Nota kesepahaman yang menjadi dasar pelaksanaan proyek antara Pemerintah Daerah Lampung dan Banten ditandatangan di atas Kapal Tunas Wisesa milik Tomi Winata.

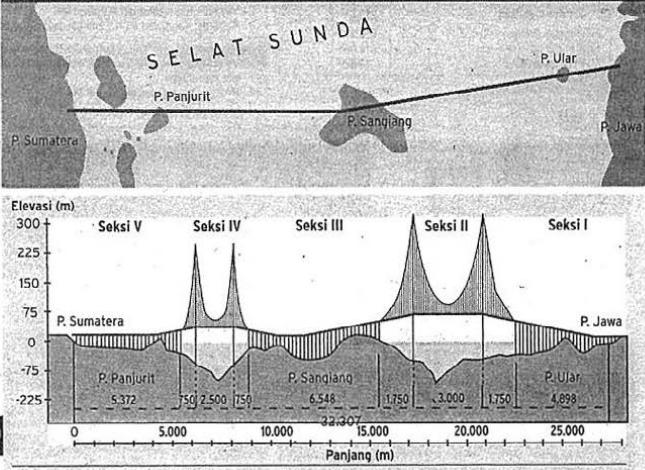
Prof Wiratman Wangsadipta dan Tomi Winata selaku pemilik Artha Graha Group, pengembang jalan tol antar pulau ini juga menandatangani selaku pelaksana proyek. Penandatanganan disaksikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzzetta dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa.

2009: Pada Desember, Keputusan Presiden Nomor 36 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda diterbitkan. Tim antara lain bertugas menyiapkan kajian kelayakan pembangunan JSS dan pengembangan Kawasan sekitar Selat Sunda, yang mencakup aspek teknis, pengembangan wilayah, lingkungan, sosial, ekonomi, keuangan, dan kelembagaan.

2011: Pada Desember, Perpres Nomor 86 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda diterbitkan dan Keppres No. 36/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi. Konsorsium Banten-Lampung (PT Graha Banten Lampung Sejahtera) ditetapkan sebagai pemakarsa proyek dan akan menyiapkan proyek, termasuk di dalamnya membiayai dan menyelesaikan persiapan proyek.

2012: Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan Perpres No. 86/2001 direvisi dan studi kelayakan JSS didanai melalui APBN. Pemerintah kemudian membentuk Tim Tujuh. Rencana pembuatan studi kelayakan pun terkait-katung.

Rencana Pembangunan JSS



Penampang Melintang Kabel suspensi

